



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor B-100.3.3/1285/2023 tanggal 23 November 2023 perihal Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.
 - b. Bahwa berdasarkan surat usulan dari Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sulawesi Barat perihal pengajuan judul Ranperda Inisiatif DPRD Tahun 2024.
 - c. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa "Hasil penyusunan Propemperda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Propemperda Provinsi dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi dengan Keputusan DPRD Provinsi.
 - d. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Barat tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan kota (Lembaran Negara Tahun 2018 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 nomor 157);.
8. Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 01 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 nomor 1);
9. Hasil Musyawarah dalam Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Barat bersama Pemerintah Daerah tanggal 30 November 2023.
10. Hasil Musyawarah dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat bersama Pemerintah Daerah tanggal 30 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Barat tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini .
- KEDUA** : Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Barat tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, dimaksud Diktum Kesatu menjadi Pedoman dan Acuan dalam Pelaksanaan Kegiatan Badan Pembentukan

Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Barat selama Tahun 2024.

- KETIGA : Anggaran untuk menunjang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, termuat dalam APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a m u j u
Pada Tanggal : 30 November 2023.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**



Dr.Hj. SITTI SURAIDAH SUHARDI, SE, M.Si
Ketua,

USMAN SUHURIAH.
Wakil Ketua

H. ABDUL HALIM.
Wakil Ketua,

H. ABDUL RAHIM, S.Ag, MH
Wakil Ketua,

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju.
3. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.
4. Para Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.

LAMPIRAN SURAT : Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Barat
 NOMOR : 13 Tahun 2023
 TANGGAL : 30 November 2023
 HAL : Propemperda Tahun 2024

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2024

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	STATUS
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
1. Inisiatif DPRD										
a.	Tata Niaga Komoditi Perkebunan di Provinsi Sulawesi Barat	Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam Tata Niaga Komoditi Pertanian dan solusi dari permasalahan tersebut	Luncuran Tahun 2022 dan 2023		- Undang-undang nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman - Undang – undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan tidak sehat	√	√	- Dinas Perkebunan - Dinas Koperindag		Sementara proses Pembahasan tindaklanjut hasil fasilitasi Kemendagri

2.	Inisiatif DPRD								
a.	Jaringan Utilitas	Mengatur norma – norma pengelolaan jaringan utilitas terhadap kebutuhan sarana utilitas terhadap masyarakat dengan tujuan pengembangan dan penataan jaringan utilitas serta terwujudnya penataan ruang dan mengurangi kesemrawutan jaringan utilitas di wilayah Provinsi Sulawesi Barat	Luncuran Tahun 2022	- Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang - Undang – undang nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Tenaga Kerja	√	√	- Dinas Perumahan dan Pemukiman - Dinas PU		Sementara proses Pembahasan tindak lanjut hasil fasilitasi Kemendagri
3.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Prov.SulBar								
a.	Perubahan atas Perda Prov.Sulbar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	Luncuran Tahun 2022	PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah		√	- BPKPD - Biro Hukum		Belum dibahas
4.	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat								
a.	Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Sebuku Energi Malaqbi	- Perubahan pasal 1 - Perubahan pasal 37 - Perubahan pasal 54 - Penambahan Materi	Luncuran Tahun 2022		√	√	- Inspektorat - Dinas ESDM - BPKPD - Biro Hukum - Biro Ekbang		Sementara proses Pembahasan
5.	Inisiatif DPRD								
a.	Perlindungan dan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dalam rangka memberikan perlindungan dan pengembangan UMKM	Luncuran Tahun 2022	UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif	√	√	- Dinas Koperindag dan UKM - Biro Ekbang		Belum dibahas
6.	Inisiatif DPRD								

	a.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren	Peran Pemerintah dalam penguatan Pondok Pesantren	Luncuran Tahun 2022	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren 	√	√	<ul style="list-style-type: none"> - Biro Pemerintahan 		Belum dibahas	
7.	Inisiatif DPRD										
	a.	Penyelenggraan Jasa Konstruksi	-	Luncuran Tahun 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi - PP 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 	√	√	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas PU dan Tata Ruang 		Belum dibahas	
8.	Dinas PU dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat										
	a.	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat (RTRW)	Penyusunan Dokumen revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat	Luncuran Tahun 2022 dan 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Undang – undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Peraturan 	√	√	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PU dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat 		Belum dibahas	

				pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan penataan ruang					
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Prov. SulBar								
a.	Pemberian Fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jaminan iklim penanaman modal dan kemudahan melakukan usaha bagi pelaku usaha atau investor di beberapa faktor	Luncuran Tahun 2022	- PP nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian fasilitas dan kemudahan investasi di daerah	√	√	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pertanian - Dinas Pendidikan - Dinas ESDM - Dinas Perhubungan - Dinas Koperindag dan UKM - DLH - Dinas PUPR - Dinas Kesehatan - Dinas Pariwisata - Disnakertrans - Dinas Kehutanan - Dinas Sosial - Badan Kesangpol - Dinas PTSP 		Belum dibahas
10.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov.SulBar								
a,	Rencana Pembangunan Jangka Panjang	Penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan	Baru	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor	√	√	Bappeda		Belum dibahas

		Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 – 2045	sasaran pokok Pembangunan daerah jangka Panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW Provinsi		86 Tahun 2017					
11.	Inisiatif DPRD									
	a.	Pemajuan Kebudayaan	upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan	Baru	1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	√	√	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Pariwisata		Belum dibahas
12.	Inisiatif DPRD									
	a.	Peningkatan Gizi Masyarakat			1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17	√	√	1. Dinas Kesehatan		Belum dibahas

					Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ditetapkan di : M a m u j u
Pada Tanggal : 30 November 2023.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**



Dr. Hj. SITI SURAIDAH SUHARDI, SE, M.Si

Ketua,

USMAN SUHURIAH.
Wakil Ketua

H. ABDUL HALIM.
Wakil Ketua,

H. ABDUL RAHIM, S.Ag, MH
Wakil Ketua,